

KIK  
Pid 17/01  
Far  
m

# SKRIPSI

**NURUL FARIATI**

## **MENINJAU UPAYA PENEGAKAN HUKUM HAK WARGA NEGARA DI INDONESIA (STUDI KASUS ACEH)**



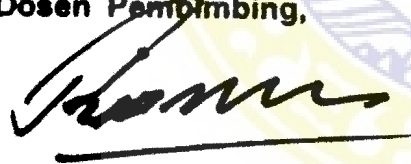
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

# **MENINJAU UPAYA PENEGAKAN HUKUM HAK WARGA NEGARA DI INDONESIA (STUDI KASUS ACEH)**

## **SKRIPSI**

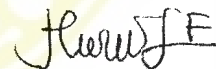
**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**



**Romlah Sartono, Hj., SH., MS.  
NIP. 130359289**

**Penyusun,**



**Nurul Fariati  
NIM. 039614361**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

menyimpang dari UU No.25/1999 dengan insentif untuk Aceh 80%, sedang pusat 20%.

#### IV.2. Saran

Untuk menyelesaikan permasalahan Aceh ada beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh pemerintah, antara lain, *pertama*, menciptakan kondisi aman kepada rakyat Aceh dengan melakukan netralisasi terhadap kelompok-kelompok separatis yang hidup dalam masyarakat dan kelompok yang menjadikan persoalan Aceh sebagai isu politik yang kemudian menjadi target politik kelompoknya. Dalam hal ini pemerintah harus mengambil posisi yang kooperatif dan persuasif terhadap rakyat Aceh dan menghindarkan diri dari penyelesaian militeristik. Sedang pendekatan keamanan digunakan secara cermat. *Kedua*, pemulihan sektor ekonomi, yaitu dengan perimbangan keuangan daerah 80% untuk Aceh dan pusat hanya 20% dalam jangka waktu interval tertentu sampai Aceh kembali normal dan rakyat Aceh telah sampai pada taraf hidup yang baik. Hal tersebut dilakukan sebagai kompensasi negara terhadap kekerasan yang terjadi di Tanah Rencong. *Ketiga*, pembangunan supra dan infra struktur di Aceh. *Keempat*, melakukan penegakan hukum dengan menjerat pelaku-pelaku pelanggar HAM di Aceh dengan peradilan HAM yang bebas, independen, bersih dari rekayasa politik dan adil. *Kelima*, pemenuhan janji politik pemerintah kepada Aceh yaitu dengan benar-benar mendudukkan Aceh sebagai daerah istimewa dengan konsekwensi makna keistimewaannya, yaitu pemberlakuan syareat Islam di Serambi Mekah.

(NF/Januari 2001)

## BAB IV

### PENUTUP

#### IV.1. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa pemerintah telah mengatur masalah penegakan hukum hak asasi manusia dengan menyempurnakan rumusan norma dalam hukum positif, diantaranya adalah dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 yang telah merinci pengaturan HAM dan telah diundangkannya UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia serta telah meratifikasi konvensi Anti Kekerasan dengan UU No.5/1998. Selain itu, pemerintah telah mengupayakan terbentuknya lembaga hukum yang menangani masalah HAM secara khusus, diantaranya adalah dengan usaha merumuskan konsep peradilan HAM dan media Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang masih dalam tahap RUU.

Dalam rangka menegakkan hukum yang berkaitan dengan kasus Aceh, pemerintah telah mengusahakan upaya menekan kekerasan terhadap rakyat Aceh dengan melakukan perundingan dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang menghasilkan antara lain kesepakatan “Jeda Kemanusiaan” dan Moratorium anti kekerasan. Sedangkan pemerintah daerah D.I. Aceh mengajukan konsep Nagroe Aceh Darussalam (NAD) sebagai kompensasi negara atas kekerasan yang terjadi di Aceh, yaitu dengan diusulkannya perimbangan keuangan pusat dan daerah yang